



PRINSIP NON-KOOPERASI SOEKARNO SEBAGAI KOMUNIKASI UNTUK MELAWAN KOLONIALISME

Fidelis Aggiornamento Saintio¹ | Anang Sujoko¹ | Wawan Sobari¹

¹Program Studi S2 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang
Jalan Veteran, Malang, Jawa Timur 65145

Correspondence

Fidelis Aggiornamento Saintio
Program Studi S2 Ilmu Komunikasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Brawijaya Malang
Email: aggiorn@gmail.com

<https://doi.org/10.26905/nomosleca.v7i1.5336>

Abstract: *Colonialism is identic monological, stereotypical, and hegemonic communication patterns. This implies a superior and inferior dichotomy between colonizer and colonized. The colonized nation which was labeled inferior in the end tended imitate (mimicry) colonizer, who claimed superior. The Soekarno's efforts counter this by using the principle of non-cooperation. Principle non-cooperation used generate the nation's independence, self-confidence and national identity. This study uses hermeneutic analysis to explore a more comprehensive meaning non-cooperation principle. Focus of this research is to find out the authentic values which is result of applying the principle. The results indicate that non-cooperation does not only revolve around reluctance to cooperate, mass action, and revolution. Soekarno used the principle of non-cooperation as a form of communication to construct alternative narratives that could used against colonialism. In the end, non-cooperation also grows the seeds of the formulation of a national personality that can used as a guideline for shaping national identity.*

Keywords: *Colonialism, Soekarno, Non-cooperation, Hegemony, National Identity*

Abstrak: Kolonialisme identik dengan pola komunikasi monologis, stereotip, dan hegemonis. Secara tidak langsung membangkitkan dikotomi superior dan inferior. Bangsa terjajah mendapat label inferior akhirnya cenderung meniru (mimikri) kolonial yang mengklaim superior. Upaya yang dilakukan Soekarno untuk melawan dengan menggunakan prinsip non-kooperasi. Prinsip non-kooperasi digunakan membangkitkan kemandirian, rasa percaya diri dan identitas nasional bangsa. Penelitian ini menggunakan analisis hermeneutika untuk menggali makna lebih komprehensif prinsip non-kooperasi. Fokus penelitian mencari nilai otentik hasil penerapan prinsip non-kooperasi. Hasil penelitian menunjukkan non-kooperasi tidak hanya berkisar pada keengganan bekerja sama, aksi massa, dan revolusi. Soekarno menggunakan prinsip non-kooperasi bentuk komunikasi menyusun narasi alternatif digunakan melawan kolonialisme. Non kooperasi menumbuhkan benih perumusan kepribadian nasional untuk pedoman membentuk jati diri bangsa.

Kata Kunci: Kolonialisme, Soekarno, Non-kooperasi, Hegemoni, Identitas bangsa

1 | PENDAHULUAN

Kolonialisme tidak hanya berkisar pada penindasan fisik, tapi juga menyebabkan pengikisan kepribadian (Adams, 1965, h. 27), pemadaman harapan untuk merdeka (Soekarno, 1964a, h. 81) ketergantungan dan ketidakmandirian di pihak terjajah terjajah (Said, 2010, h. 48) Meski demikian, terdapat argumentasi yang melegalkan kolonialisme.

Dalam perjanjian Volkebond pasal 22, kolonialisme dianggap sebagai misi suci untuk memperadabkan bangsa kulit berwarna. Sedangkan menurut Said (2010, h. 62), hegemoni Barat terhadap Timur itu adalah hak istimewa sebab pihak Barat merasa memiliki kebudayaan yang lebih kuat untuk menafsirkan dan mendefinisikan bangsa-bangsa Asia.

Hal ini menunjukkan bahwa kolonialisme mengandung gagasan superioritas bangsa Barat. Bangsa Barat selalu identik dengan otoritas, stabilitas, keparipurnaan, dan superioritas. Hal ini dinilai oleh (Huddart, 2006, h. 34) sebagai innate superiority. Ide superioritas itu sudah ada terkandung di dalam benak bangsa Barat sehingga mereka berhak untuk memperadabkan bangsa non-Barat.

Realitas ini pada akhirnya mengarahkan kolonialisme kepada praktik stereotip. Kekayaan pemikiran dan kebudayaan bangsa-bangsa yang terjajah disimplifikasi ke dalam satu justifikasi umum, yakni inferior (Huddart, 2006, h. 3). Karena selalu ditempatkan “di bawah” bangsa Barat, bangsa Timur (terjajah) tidak pernah muncul atas nama dirinya, melainkan atas nama Barat. Timur yang sebenarnya tidak akan pernah tersentuh karena selalu direpresentasikan menurut cara pikir Barat (Said, 2010, h. 37). Pemikiran stereotip ini pada akhirnya menghasilkan kecenderungan untuk mimikri (meniru).

Menurut Bhabha (H. Bhabha, 1994, h. 86) mimikri adalah kecenderungan bangsa terjajah untuk meniru bangsa penjajah. Kecenderungan ini tidak muncul begitu saja dari pihak terjajah. Kecenderungan ini adalah akibat dari injeksi stereotip yang bersifat satu arah dari pihak penjajah. Label inferior ditanamkan secara paksa sehingga membuat bangsa terjajah merasa kecil dan tidak mampu.

Di pihak lain, kehadiran Barat yang mengklaim diri lebih superior membuat bangsa terjajah cenderung untuk meniru mereka. Sayangnya klaim superioritas itu disejajarkan begitu saja dengan sifat “beradab”. Oleh karena itu, superioritas Barat dijadikan standar untuk mengukur keadaban suatu bangsa, lebih-lebih bangsa terjajah. Inilah alasan mengapa mimikri ini juga sering disebut Bhabha sebagai proses memperadabkan yang licik (Huddart, 2006, h. 40).

Meski secara tidak langsung didorong untuk meniru penjajah, praktik ini masih bersifat ambigu sebab praktik ini bertujuan untuk mengubah/mendikte bangsa terjajah agar sama seperti penjajah yang superior. Namun pada akhirnya proses

mimikri tersebut tak boleh menjadikan bangsa terjajah sama persis dengan bangsa penjajah; harus tetap ada perbedaan di antara keduanya. Sebab, ketika bangsa terjajah menjadi sama persis dengan penjajah, maka jurang superioritas dan inferioritas pun mengecil. Praktik mimikri yang tidak konsisten dari penjajah ini, pada akhirnya disebut sebagai ambivalensi (ambivalence) oleh Bhabha (1994, h. 86).

Sekalipun menimbulkan ambivalensi, praktik mimikri ini dapat mengakibatkan keterpisahan (disconnection) dengan kebudayaan asli (Gardner et al., 2015, h. 2). Dengan ini, kebudayaan bangsa terjajah akan pelan-pelan tergantikan dengan kebudayaan bangsa penjajah. Selain itu, praktik mimikri yang berujung pada ambivalensi ini akan melanggengkan kondisi inferioritas, sebab bangsa terjajah tidak akan pernah serupa dengan “superioritas” bangsa Barat (Bhabha, 1994, h. 90).

Untuk melawan praktik stereotip yang berujung pada mimikri, Bhabha (dalam Huddart, 2006, h. 31, 40) berpendapat bahwa perbedaan yang menunjukkan otentitas itu harus tetap dipertahankan. Stereotip dan mimikri itu adalah hasil dari komunikasi yang satu arah dan monologis monologis (H. Bhabha, 1990, h. 301). Ini tak boleh dibiarkan karena akan mematikan cara meng-ada yang otentik dari mereka yang terkena label stereotip (H. K. Bhabha, 1995)

Dalam konteks Indonesia, pemikiran stereotip ini nyata ketika kita melihat berbagai label, seperti “inlander” (Soekarno, n.d., h. 114; Weinstein, 2007, h. 48). Kolonialisme juga menjadikan masyarakat Indonesia kecil, bermental budak, tidak percaya diri, ingin selalu dituntun (Soekarno, 1964, h. 257) dan tidak punya kultur yang beradab (h. 276). Hal ini terjadi karena kondisi masyarakat Indonesia yang terjajah tidak sesuai dengan standar pihak kolonial. Maka dari itu, benarlah pendapat Said (2010, h. 6) bahwa Barat menciptakan asumsi dan standar tertentu dan bangsa-bangsa Timur (terjajah) dipaksa untuk memenuhinya. Ketika bangsa-bangsa Timur tidak bisa memenuhi standar dan asumsi itu, maka yang terjadi adalah praktik stereotip dan mimikri.

Untuk melawan praktik ini, Soekarno telah merintis usaha agar bangsa Indonesia tidak mengikuti dan meniru nilai-nilai dan kemauan pihak kolonial. “Kebesaran rakyat kita sudah terbenam oleh kepurbakalaan karena kebesaran imperialisme” (Soekarno, 1964, h. 277). Soekarno menilai bahwa penjajahan telah membelenggu kehendak dan memadamkan daya setiap anggota masyarakat.

Untuk melawan praktik ini Indonesia perlu berdiri di kaki sendiri dan menerapkan prinsip non-kooperasi (Soekarno, h. 1964, h. 75). Oleh Soekarno, istilah non-kooperasi dijelaskan secara mendalam di dalam artikel Azas; Azas-Perdjoangan; Taktik di tahun 1933 (h. 249). Prinsip non-kooperasi ini dicetuskan karena Soekarno melihat ada orang Indonesia yang rela menyerahkan diri mereka kepada pemerintah kolonial dengan timbal balik kemerdekaan. Bentuk penyerahan

diri itu adalah “duduk di dalam sistem-sistem pertuanan” (h. 188), “menerima jabatan dari pihak kolonial” (h. 189), dan “meminta-minta (kemerdekaan)” (h. 233). Non-kooperasi dinilai dapat memperkuat aksi massa dan aksi-aksi radikal untuk melawan penjajahan.

Beberapa tulisan juga telah menafsirkan pernyataan Soekarno ini, bahwa non-kooperasi berarti menolak segala bentuk kerjasama dengan pemerintah kolonial belanda (Hafiz et al., 2020; Hartanto, 2005; Karisma et al., 2018). Prinsip non-kooperasi juga berarti terjun langsung ke masyarakat dan menolak untuk menjadi bagian dari anggota Volksraad atau dewan-dewan bentukan pemerintah kolonial (Dewi, 2015).

Di pihak lain, ketika melihat tulisan-tulisan Soekarno di era pra-kemerdekaan secara komprehensif, non-kooperasi bukan sekadar tidak mau bekerja sama dengan penjajah. Selain kemerdekaan, ada tujuan lain yang ingin dicapai oleh Soekarno ketika ia menerapkan prinsip non-kooperasi, yakni “menyusun politik ‘kita sendiri’, mendirikan ‘kita sendiri’, dan menyusun roh dalam Gedung Kemerdekaan kita. Ini dibutuhkan untuk membangun self-reliance” (Soekarno, 1964, h. 212). Hal ini sejalan dengan kegelisahan Soekarno tahun 1930 ketika menyampaikan pledoi pembelaannya saat disidang di hadapan pemerintah kolonial.

[...] selama suatu negeri masih bersifat “protektorat” ataupun “daerah mandat”, — pendek kata selama suatu negeri masih belum sama sekali leluasa mengadakan aturan-aturan rumah tangga sendiri, — maka sebagian atau semua aturan-aturan rumah tangganya, mempunyai “cap” yang imperialistis adanya [...] Ia adalah seolah-olah terikat kaki dan tangannya, tak bisa leluasa berjuang melawan daya-daya imperialisme yang membencanainya, tak bisa leluasa berjuang mengalang-alangi syarat-syarat hidupnya diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain, tak bisa leluasa berusaha memperuntukkan syarat-syarat hidupnya itu bagi perikehidupan ekonominya sendiri, perikehidupan kebudayaannya. (Soekarno, n.d., h. 65)

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip non-kooperasi akan membebaskan bangsa Indonesia kepada kemandirian dan penemuan jati diri. Memang, karakter utama dari prinsip non-kooperasi adalah perlawanan (Soekarno, 1964, h. 191). Namun perlawanan itu diterjemahkan secara positif dengan nasionalisme yang “mendirikan”, bukan nasionalisme yang chauvinistis dan “membenci” bangsa lain (Soekarno, n.d., h. 102).

Oleh Soekarno, non-kooperasi juga dijadikan pendorong agar bangsa Indonesia dapat menemukan jati diri dan kepribadian dengan usaha sendiri. “Dengan usaha sendiri” ini diterjemahkan oleh Soekarno sebagai independensi nilai; untuk tidak meminjam “isme-isme” dari luar bangsa Indonesia (Soekarno, 1964, h. 66). Terhadap kolonialisme, inilah bentuk perlawanan Soekarno agar bangsa Indonesia tidak taat buta dan mau didikte oleh pihak penjajah. Hal ini dirasa penting

mengingat efek paling buruk dari hegemoni kolonialisme adalah penghilangan identitas bangsa (Sherry & St-Pierre, 2000, h. 168)

Jadi, non-kooperasi bukan sekadar menjadi asas untuk mencapai kemerdekaan dengan tidak bekerjasama dengan pemerintah kolonial. Dengan menerapkan prinsip non-kooperasi, Soekarno hendak mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak pasrah begitu saja injeksi identitas dan pola pikir dari pihak kolonial. Dengan ini, Soekarno ingin membangun harapan dan kepercayaan pada kemampuan bangsa Indonesia. Harapan dan kepercayaan diri inilah “yang menjadi sendinya tiap-tiap roh nasional (Soekarno, 1964, h. 81)

Hal ini diungkapkan agar bangsa Indonesia terhindar dari mentalitas budak. Selama penjajahan Soekarno melihat bahwa rakyat harus meminta-minta agar diri mereka selamat. Mentalitas ini akan meneguhkan label bahwa bangsa Indonesia (dan bangsa terjajah lainnya) sebagai bangsa yang inferior. Dengan mentalitas ini, rakyat dipaksa untuk menuruti dan mengikuti keinginan kolonial. Apa yang terjadi ini bisa menuntun bangsa Indonesia kepada proses mimikri

Salah satu akibat mimikri adalah hilangnya identitas atau kepribadian bangsa terjajah (Bhabha, 1994, h. 90). Hal ini juga dirasakan oleh Soekarno ketika melihat kepribadian dan kepercayaan diri bangsa Indonesia yang makin terkikis (Soekarno, 1964, h. 188). “Bangsa kulit berwarna itu memang bangsa yang kurang dan bangsa kulit putih itu adalah adhi-adhining bangsa” (Soekarno, n.d., h. 114) dan “kita lupa bahwa kita bisa besar dan pandai.” (h. 277)

Yang terjadi pada Indonesia dan bangsa-bangsa terjajah lain ini adalah dampak dari bentuk komunikasi yang monologis atau satu arah dari Barat. Hal ini terjadi karena klaim sepihak bahwa Barat adalah bangsa yang superior sehingga mereka merasa pantas untuk memperadabkan bangsa-bangsa non-Barat (Bhabha, 1990, h. 300). Bhabha menilai bahwa ini harus dilawan dengan memunculkan narasi kebangsaan yang berdiri mandiri (h. 2); sebab terbentuknya bangsa itu tidak terbentuk atas pendiktean yang bersifat monologis (h. 303). Apa yang dicetuskan oleh Bhabha tersebut sebenarnya sudah diperjuangkan Soekarno sejak ia muda. Untuk memberikan narasi perlawanan, Soekarno menggunakan prinsip non-kooperasi yang kelak diterjemahkan ke dalam beberapa taktik dan aksi (Soekarno, 1964, h. 249).

Penelitian ini dimaksudkan untuk menyelidiki apa saja usaha yang dirintis dan nilai otentik apa yang ditemukan Soekarno ketika ia menjalankan prinsip non-kooperasi. Karena non-kooperasi juga mengandung unsur perjuangan untuk menemukan jati diri bangsa, maka dapat dipastikan bahwa hasil dari prinsip ini adalah kebaruan nilai yang sama sekali berbeda dengan nilai-nilai warisan atau nilai-nilai hasil pendiktean pihak kolonial. Kebaruan nilai tersebut dapat dijadikan jawaban dari kegelisahan Said (2010, h. 31) yakni agar bangsa Timur

dapat merepresentasikan diri sebagaimana adanya; bukan sebagaimana seharusnya).

2 | METODE PENELITIAN

Pemaparan prinsip non-kooperasi dari Soekarno tertuang dalam beberapa esai di masa pergerakan nasional. Non-kooperasi adalah aksi nyata dari azas perjuangan yang dicanangkan Soekarno, yakni kebangsaan (Soekarno, 1964, h. 249). Apa yang dimaksudkan Soekarno ini tentu tidak datang begitu saja. Ide non-kooperasi pasti tersusun atas berbagai rintisan gagasan dan berbagai macam latar belakang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan lingkaran hermeneutika Gadamer untuk melihat kaitan non-kooperasi dengan ide-ide dan konteks yang melingkupinya (E. Palmer, 1969, h. 77).

Lingkaran hermeneutika Gadamer tidak melihat gagasan non-kooperasi hanya sebagai ide tunggal yang berdiri sendiri. Ketika dilihat sebagai ide tunggal, maka non-kooperasi “hanya” berisi gagasan tentang perlawanan dan kehendak untuk tidak bekerjasama dengan pihak kolonial untuk memperjuangkan kemerdekaan. Namun, hermeneutika meyakini bahwa dalam kata dan bahasa ada klaim tentang “cara mengada” pencetus/penulis/penuturnya (Gadamer, 2004, h. 417). Dengan kata lain, di balik non-kooperasi juga terdapat konteks, latar belakang, bahkan merefleksikan kehidupan dan pola pikir Soekarno sebagai pencetusnya (bdk. (Jensen, 2018, h. 4)

Dengan hermeneutika, teks atau ucapan tidak akan dilihat sebagai benda mati dan tidak dibaca secara harfiah, tetapi sebagai *house of being*. Ketika ini diterapkan, maka harapannya adalah penemuan akan makna yang tersembunyi atau untuk membuat dari yang tidak dimengerti menjadi dapat dimengerti (Wierciński, 2005, h. 171). Penemuan makna yang tersembunyi ini dapat memicu pemahaman yang lebih komprehensif terhadap sebuah teks. Makna sebuah teks tidak akan tinggal tetap, melainkan terus diperbaharui dan tetap kontekstual dengan seiring dengan perubahan zaman. Ini adalah bentuk *historically effected consciousness* yang membuat penafsir/peneliti sadar akan keberlanjutan historis atas suatu makna (Mueller-Vollmer, 1987, h. 39; Winartono et al., 2019).

Selain sebagai metode, hermeneutika juga dapat meruntuhkan salah satu bentuk hegemoni Barat atas Timur, yakni hegemoni akademis (bdk. Said, 2010, h. 4). Hal ini dikarenakan hermeneutika tidak hanya berhenti pada satu teks atau satu narasi yang dipaksakan. Hermeneutika membebaskan penggunaannya untuk bergerak lebih jauh demi menemukan makna yang lebih komprehensif. Bagi kepentingan bangsa terjajah, hal ini dapat dijadikan alat untuk meruntuhkan hegemoni, sebab hegemoni membatasi pola pikir dan narasi-narasi alternatif (Roy

& Oludaja, 2009, h. 264). Dengan metode hermeneutika, penulis melihat bagaimana Soekarno menyusun narasi alternatif untuk melawan hegemoni dan praktik stereotip yang dilakukan oleh penjajah. Ini akan mempersempit jurang kesenjangan antara powerless studied (terjajah) dan powerful studier (penjajah).

3 | HASIL DAN PEMBAHASAN

Persatuan untuk Melawan Politik Divide et Impera

Politik kolonial Belanda didasarkan pada politik pecah belah atau divide et impera (Mahfud, 2020; Soekarno, n.d., h. 144). Ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lemah, lalu mengalami kemunduran dalam bidang sosial-ekonomi dan akal budi (Soekarno, n.d., h. 120). Dengan praktik ini, Soekarno menilai bahwa pihak kolonial ingin memasukkan masyarakat ke dalam golongan-golongan yang lebih kecil agar dapat didikte dengan mudah (h. 114).

Untuk melawan hal ini, Soekarno mencanangkan persatuan Indonesia. Namun saat itu ia sadar bahwa persatuan yang kokoh dibutuhkan perekat sosial. Sayangnya hal tersebut belum terjadi di Indonesia. Ada tiga nilai pergerakan yang seolah bertentangan, yakni nasionalisme, Islamisme, dan marxisme (Soekarno, 1964, h. 3). Untuk mendamaikan ketiganya, Soekarno menulis esai dengan judul yang sama, yakni Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme (1926). Esai ini adalah salah satu tonggak untuk membangun membangun persatuan nasional (Latif, 2018, h. 220) dan sebagai sarana pembuktian bahwa ketiga sifat itu tidak bertentangan satu sama lain.

Namun demikian penulis melihat bahwa usaha tersebut bukan ditujukan untuk membangun persatuan saja. Dalam kacamata non-kooperasi Soekarno, ini adalah usaha untuk mengangkat nilai-nilai otentik bangsa Indonesia (Soekarno, 1964, h. 1). Saat penjajahan, agama Islam adalah agama yang tertindas (Mahfud, 2020), persatuan nasional juga sulit diupayakan karena praktik penjajahan mematikan setiap usaha untuk merdeka (Soekarno, 1964, h. 4), dan marxisme dilihat sebagai metode yang tepat untuk melawan kolonialisme yang merupakan hasil dari kapitalisme (h. 512). Selain itu, Soekarno menilai bahwa kondisi rakyat Indonesia hampir sama dengan gambaran masyarakat proletar yang dicituskan Marx (Adams, 1965, h. 65).

Pengangkatan nilai-nilai otentik tersebut dilandaskan pada persamaan nasib dan keinginan untuk bersatu (Soekarno, 1964, h. 4). Meski di antara ketiga nilai itu terdapat pertentangan, hal itu tidak disinggung Soekarno secara eksplisit. Tampak sekali bahwa Soekarno fokus pada “pendamaian”, kecocokan, dan hubungan

persamaan di antara ketiganya. Keinginan kuat Soekarno untuk membangun persatuan menjadikannya dijuluki sebagai seorang yang “mabuk persatuan” (h. 204).

Julukan tersebut dapat diterima karena selama membangun sintesis, Soekarno hanya memandang dari sisi persamaan antara ketiga nilai itu saja. Selain itu penulis melihat bahwa usaha tersebut bersifat terburu-buru karena Soekarno berkata “Entah bagaimana tercapainya persatuan itu; entah pula bagaimana rupanya persatuan itu; akan tetapi tetaplah bahwa kapan yang membawa kita ke-Indonesia-Merdeka itu, ialah Kapal-Persatuan adanya” (Soekarno, 1964, h. 2). Meski mengandung kekurangan, ketika dilihat dari kaca mata persatuan, apa yang dicetuskan Soekarno ini merupakan bentuk komunikasi untuk melawan praktik *divide et impera* dari pihak kolonial.

Esai *Nasionlisme, Islamisme, Marxisme* (1926) menjadi penanda bahwa Indonesia memiliki karakter nilai yang otentik dan berakar dari konteks masyarakat setempat. Ini menjadi pemenuhan gagasan Bhabha (1990, h. 303) bahwa bangsa-bangsa terjajah memiliki cara tersendiri untuk mendefinisikan siapa diri mereka dan karakter mereka tidak dapat dikendalikan oleh bangsa lain. Dengan demikian, pemilihan prinsip non-kooperasi adalah hal yang bahkan bersifat wajib untuk diterapkan sebab prinsip ini membuka pintu bagi kemunculan narasi-narasi alternatif dan otentik yang tidak tunduk terhadap hegemoni superioritas bangsa lain.

Marhaenisme untuk Melawan Hegemoni atas Identitas Nasional

Marhaenisme adalah ideologi untuk melindungi rakyat dari tekanan dan eksploitasi kapitalisme, kolonialisme, dan feodalisme (Aminuddin et al., 2019, h. 420). Gagasan marhaenisme ini hampir sama dengan gagasan masyarakat proletar dari Marx. Dalam esai *Indonesia Menggugat*, Soekarno mengatakan bahwa imperialisme menjadikan masyarakat Indonesia menderita, miskin, dan kecil. Kondisi ini hampir sama dengan kondisi kaum proletar dari Marx yang muncul karena penindasan kaum borjuis. Penindasan ini menyebabkan kaum proletar tidak berdaya dan mengabdikan semua tenaganya kepada kaum borjuis. Di sinilah awal mula eksploitasi terjadi.

Namun, hal ini berbeda dengan gagasan marhaenisme dari Soekarno. Soekarno menilai bahwa rakyat Indonesia memang tertindas, tetapi penindasan itu tidak merenggut semua sumber daya masyarakat, sebab mereka masih beberapa alat produksi. Selain itu, penindasan tidak dilakukan oleh rekan satu bangsa, melainkan dilakukan oleh orang asing, yakni penjajah.

A Marhaenist is a person with small means; a little man with little ownership,

little tools, sufficient to himself. Our tens of millions of impoverished souls work for no person and no person works for them. There is no exploitation of one man by another. Marhaenism is Indonesian Socialism in operation (Adams, 1965, h. 63)

Aminuddin, dkk (2019, h. 423) berpendapat bahwa Soekarno mengalami kesulitan mengangkat martabat dari rakyat kecil di hadapan pihak kolonial yang superior. Untuk mengatasi hal itu, gagasan marhaenisme dimunculkan. Seperti gagasan tentang proletar, marhaenisme diharapkan menjadi komponen besar yang dapat digunakan untuk melawan kolonialisme dan mendorong terbentuknya masyarakat yang baru dan beridentitas (bdk. Adams, 1965, h. 65).

Dengan gagasan marhaenisme, Soekarno berusaha menjalin komunikasi dengan semua masyarakat Indonesia. Dengan gagasan itu, Soekarno mewadahi dan menempatkan masyarakat Indonesia ke dalam satu kelas yang sama. Harapannya ialah masyarakat Indonesia menjadi sadar akan kondisinya, dan pada akhirnya mau bertindak secara radikal. Radikalisme yang diharapkan oleh Soekarno itu adalah aksi massa, menyusun perhimpunan, rapat-rapat umum, demonstrasi, dan menulis artikel di surat kabar dan majalah (Soekarno, 1964, h. 168)

Kemunculan gagasan marhaenisme adalah simbol penolakan terhadap pendiktean identitas dari pihak kolonial yang cenderung satu arah. Kendali pihak kolonial atas identitas bangsa mengakibatkan inferioritas. Hal ini tampak terlihat pada sistem-sistem sosial yang selalu mengunggulkan pihak kolonial (Adams, 1965, h. 28, 39, 41, 43). Dengan marhaenisme, Soekarno memberikan paradigma baru bagi jati diri bangsa Indonesia. Jati diri Indonesia adalah hal yang patut dibanggakan, yang dapat menjadi alat untuk membentuk persatuan dan menjadi senjata untuk melawan kolonialisme (Soekarno, 1964, h. 168)

Marhaenisme juga merupakan bentuk non-kooperasi karena ini memberikan tawaran identitas alternatif bagi masyarakat Indonesia. Dengan ini Soekarno mengajak masyarakat untuk tidak tunduk buta pada identitas "inlander" yang di dalamnya terkandung sifat bodoh dan rendahan (Adams, 1965, h. 28). Selain itu penemuan identitas ini merupakan tahapan penting (milestones) bagi bangsa Indonesia karena telah ditemukan satu jati diri yang digali dari kondisi faktual bangsa Indonesia; dan bukan bentukan dari pihak atau bangsa luar. Hal ini selaras dengan semangat Soekarno yang mengatakan, "Pergerakan Indonesia haruslah memikir sendiri, mengupas soal-soalnya sendiri, mencari semboyan-semboyannya sendiri, menggembelng senjata-senjatanyanya sendiri" (Soekarno, 1964, h. 157).

Gotong-royong untuk Melawan Stereotip dan Mimikri

Prinsip non-kooperasi yang selanjutnya diterapkan pada cetusan gagasan gotong-royong. Prinsip ini pertama kali disebutkan oleh Soekarno dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Dalam pidato itu Soekarno menawarkan 5 sila dasar yang dapat dijadikan landasan dan tujuan bagi Indonesia merdeka. Ketika dirangkum, kelima nilai itu bersumber pada satu jati diri khas masyarakat Indonesia, yakni gotong-royong.

Oleh Soekarno, gotong-royong dinilai sebagai jati diri asli masyarakat Indonesia. Nilai ini bukanlah nilai yang diwariskan oleh pihak kolonial. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki identitas yang otentik. “Puluhan tahun dadaku telah menggelora dengan prinsip-prinsip itu.”(Soekarno, 1964b, h. 32). Nilai gotong-royong sendiri bukanlah hasil perasaan subjektif Soekarno. Di dalam proses penggalian 5 butir sila dan gotong-royong, peran Soekarno adalah penggali (h. 78). Gotong-royong sudah ada tanpa Soekarno berpidato, dan melekat pada pengembannya, yakni manusia Indonesia.

Ada beberapa catatan yang penting untuk disebutkan terkait dengan gotong-royong. *Pertama*, dengan gotong-royong, bangsa Indonesia mendapatkan wadah untuk bertukar nilai (sharing values). Gotong royong adalah penyelamat persatuan (Soekarno, 1964b, h. 65); bersifat lebih dinamis daripada “kekeluargaan” dan tidak pilih-pilih (h. 32); inklusif dan humanis (Y Latif, 2011, h. 25). Dengan sifat-sifat ini, gotong royong menjadi wadah komunikasi untuk menyamakan field of experience anggota masyarakat atau kelompok yang berbeda-beda.

Kedua, gotong-royong sebagai wadah komunikasi tidak otomatis menghapuskan perbedaan (1964b, h. 17). Setiap identitas dan kebudayaan yang ada di Indonesia pasti menghasilkan satu nilai tetentu. Hal ini tidak dihilangkan begitu saja karena persatuan Indonesia dibangun tidak dengan menghapus keragaman. Elemen-elemen partikular seperti suku, budaya, dan etnis merupakan anggota bagi kesatuan yang lebih besar, yakni Indonesia (bdk. h. 21).

Hal ini menunjukkan bahwa persatuan dan tawaran Soekarno terkait identitas bangsa tidak dibangun atas cara komunikasi yang monologis, canonical, dan linear khas kolonialisme. Soekarno menawarkan identitas dan nilai yang merupakan hasil dari komunikasi multi-arah. Soekarno berani menarik sintesis atas keragaman nilai dan hal itu ditawarkan sebagai jati diri khas bangsa Indonesia

Ketiga, gotong-royong menghilangkan dikotomi antara aku dan liyan (the others) yang dulu pernah dipraktikkan pihak kolonial (Mahfud, 2020). Di sanalah, segregasi identitas ditonjolkan sehingga terbentuk pola pikir dikotomis yang membagi manusia berdasarkan ras, suku, agama, dan kebudayaan. Namun, gotong-royong menawarkan penghapusan pola pikir dikotomis itu, karena narasi

gotong royong tidak mau bergelut dengan kebakuan identitas satu orang atau kelompok. Yang menjadi penekanan bukanlah persamaan dan keseragaman identitas. Lebih dari itu, gotong-royong menawarkan cara mengada yang baru, yakni bagaimana segala jenis perbedaan yang ada dapat hidup bersama tanpa mempermasalahakan perbedaan.

Dengan nilai gotong-royong ini Soekarno mengajak Indonesia untuk keluar dari label yang diberikan oleh pihak kolonial. Bangsa Indonesia bukanlah bangsa bentukan bangsa lain dan gotong royong memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk tampil apa adanya, bukan sebagaimana seharusnya. Indonesia tampil “sebagaimana adanya” karena bangsa ini telah memiliki jati diri khas yang tidak dimiliki bangsa-bangsa lain. Secara ideologis, hal ini secara ototomatis mematahkan praktik stereotip dan dorongan mimikri untuk meniru nilai dan kebudayaan bangsa lain.

Penemuan Jati Diri Bangsa sebagai Hasil dari Prinsip Non-kooperasi

Dari beberapa hasil poin di atas, dapat dilihat bahwa prinsip non-kooperasi tak hanya berkisar pada aksi massa dan tindakan-tindakan yang kasat mata. Prinsip non-kooperasi ternyata juga terkait dengan kondisi mental yang anti kolonialisme. Ketika ditinjau lebih dalam puncak dari prinsip non-kooperasi ini adalah penemuan kepribadian bangsa Indonesia. Non-kooperasi yang dibangun oleh Soekarno ternyata tidak hanya berkisar pada perlawanan tapi juga penemuan jati diri.

Narasi perlawanan memang merupakan sesuatu yang lumrah di dalam sejarah bangsa yang pernah terjajah (Gandhi, 1998, h. 98). Perlawanan menjadi sesuatu yang biasa karena itulah cara untuk bebas dari penindasan kolonial. Namun fokus pada perlawanan akan semakin mengaburkan tujuan inti dari bangsa-bangsa terjajah, yakni penemuan jati diri. Perlawanan terhadap penindasan memang dapat menghasilkan kemerdekaan. Namun kemerdekaan itu tidak akan berarti apa-apa ketika jati diri dan kepribadian masih berada dalam belenggu penjajahan.

Dengan non-kooperasi, Soekarno mendidik bangsa Indonesia bahwa nasib, jati diri, dan kepribadian bangsa itu harus digali di dalam diri bangsa. Hal-hal tersebut tidak boleh merupakan satu tiruan dari luar bangsa. Pencarian prinsip-prinsip tersebut harus merupakan intisari budaya masyarakat sendiri. Dengan kata lain, prinsip non-kooperasi, selain digunakan sebagai asas dan prinsip perjuangan (Soekarno, 1964, h. 248), juga digunakan untuk membentuk independensi bangsa. Dengan ini, kemerdekaan Indonesia tidak bersifat pasif (merdeka dari), tapi juga bersifat aktif (merdeka untuk); karena landasan nilainya digali dan berakar dari bangsa sendiri.

Benar bahwa usaha penerapan non-kooperasi Soekarno masih dipengaruhi gagasan-gagasan luar. Hal ini terlihat jelas ketika merumuskan marhaenisme yang berakar kuat pada Marxisme. Ketika merumuskan paham kebangsaan dalam esai Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme pun Soekarno masih meminjam gagasan Otto Bauer dan Ernest Renan (Soekarno, 1964, h. 3). Namun menjelang kemunculan gagasan gotong-royong dalam Pidato 1 Juni 1945, ide-ide Soekarno pun berkembang. Gagasan-gagasannya tidak lagi didominasi oleh nilai-nilai dari luar Indonesia. Dalam Pidato 1 Juni 1945 itu Soekarno banyak menggali nilai-nilai otentik bangsa Indonesia, seperti ketuhanan, demokrasi ekonomi, musyawarah-mufakat, dan juga gotong-royong.

Berbagai temuan yang dihasilkan Soekarno menegaskan bahwa Indonesia memiliki jati diri dan kepribadian yang khas. Dilihat dari konteks non-kooperasi, ini adalah momentum untuk menghapus dikotomi superioritas Barat dan inferioritas Timur. Barat memandang Timur secara dengan cara yang berbeda dan sayangnya perbedaan itu dianggap sebagai sesuatu yang “salah” (Said, 2010, h. 31-32). Namun, Soekarno tak mau menjadikan perbedaan itu sebagai sesuatu yang aneh. Perbedaan itu adalah representasi khas bangsa Timur (khususnya Indonesia) ketika menampilkan diri. Latar belakang historis, kebudayaan dan nilai, telah membuat menjadi bangsa dengan cara mengada tertentu dan ini tentu memengaruhi cara Indonesia merepresentasikan diri.

Kekhasan inilah yang tidak dipahami oleh pihak kolonial, sebab mereka membaca dan mendefinisikan tanah jajahan menurut cara pandang mereka. Dengan prinsip non-kooperasi, Soekarno berhasil menuntun Indonesia untuk keluar dari penjara stereotip dari Barat dan kecenderungan untuk mimikri. Proses ini pada akhirnya akhirnya berujung pada penemuan nilai-nilai otentik yang dapat dijadikan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Melalui prinsip non-kooperasi, bangsa Indonesia memiliki cara dan dasar untuk menampilkan keaslian diri diri sebagaimana adanya, dan bukan menurut cara pandang bangsa lain.

4 | SIMPULAN

Kesimpulan berisi refleksi seluruh artikel dan saran terhadap pengembangan kelimuan. Kesimpulan menggambarkan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian atau temuan yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan atau hipotesis. Saran menyajikan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut. Maksimal disajikan dalam satu paragraf tanpa ada kutipan.

REFERENSI

- Adams, C. (1965). *Sukarno; an Authobiography as Told to Cindy Adams*. Toppan Printing.
- Aminuddin, Katimin, & Syukri. (2019). Sukarno 's Thought about Marhaenism. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 2(2), 420–426.
- Bhabha, H. (1990). *Nation and Narration*. Routledge.
- Bhabha, H. (1994). *The Location of Culture* (H. Bhabha (Ed.)). Routledge. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Bhabha, H. (1995, February). Black Male. *Artforum*, 86–87, 110.
- Dewi, M. (2015). *Dari Gemeenteraad Sampai Volksraad*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Palmer, R. (1969). *Hermeneutics* Richard E. Gadamer, H.-G. (2004). *Truth and Method* (2nd ed.). Continuum.
- Gandhi, L. (1998). *Postcolonial Theory; A Critical Introduction*. Allen & Unwin. <https://doi.org/10.4135/9781412956246.n435>
- Gardner, A., Mark, L., & Ulrike, S. (Eds.). (2015). *Post-colonial Theory*. In *The Oxford Handbook of Archaeological Theory*. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199567942.001.0001>
- Hafiz, A., Zidni, & Hadi, M. S. (2020). Sejarah Pandangan Tan Malaka dengan Soekarno dalam Perspektf Kemerdekaan Indonesia 1949-1940. *Historia*, 4(1), 24–33.
- Hartanto, H. (2005). *Sejarah Pertentangan Soekarno-Hatta dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Politik Indonesia*. Universitas Negeri Semarang.
- Huddart, D. (2006). Homi K. Bhabha. In \. Routledge. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05386-2_3
- Jensen, K. B. (2018). The Double Hermeneutics of Communication Research. *Javnost - The Public*, 25(1–2), 177–183. <https://doi.org/10.1080/13183222.2018.1418968>
- Karisma, N. A., Swastika, K., & Sumardi. (2018). The Ideas Differences Between Soekarno and Hatta 's Regarding The National Movement Strategy In 1927-1936. *Jurnal Historica*, 2(2252–4673), 153–167. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JHIS/article/view/8889/5986>
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna*. Gramedia.
- Latif, Y. (2018). Identitas Keindonesiaan dan Aktualisasi Pancasila bagi Generasi Milenial di Era Digital. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 33, 5–19.
- Mahfud, M. D. (2020, January 1). Tidak Ada Islamofobia di Indonesia. *Kompas*, 6.
- Mueller-Vollmer, K. (Ed.). (1987). *The Hermeneutics Reader* (Vol. 38, Issue 3).

Continuum. <https://doi.org/10.2307/590701>

- Roy, A., & Oludaja, B. (2009). Hans-Georg Gadamer's Praxis : Implications for Connection and Action in Communication Studies . *Communication, Culture & Critique*, 2(3), 255–273. <https://doi.org/10.1111/j.1753-9137.2009.01038.x>
- Said, E. (2010). *Orientalisme; Menggugat Hegemoni Barat dan Mendudukkan Timur sebagai Subjek*. Pustaka Pelajar.
- Sherry, S., & St-Pierre, P. (Eds.). (2000). *Changing The Terms; Translating in the Postcolonial Era*. University of Ottawa Press.
- Soekarno. (n.d.). *Indonesia Menggugat*. Departemen Penerangan RI.
- Soekarno. (1964a). *Di Bawah Bendera Revolusi*. Departemen Penerangan RI.
- Soekarno. (1964b). *Tjamkan Pantjasila*. Departemen Penerangan RI.
- Weinstein, F. B. (2007). *Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence from Sukarno and to Soeharto*. Equinox.
- Wierciński, A. (2005). *Between Description and Interpretation: The Hermeneutic Turn in Phenomenology* (A. Wierciński (Ed.)). <https://books.google.com/books?id=JeNDHAAACAAJ&pgis=1>
- Winartono, W., Antoni, A., & Sujoko, A. (2019). *Membumikan Ilmu Komunikasi di Indonesia (Pembacaan Hermeneutik Gadamerian atas Tulisan-Tulisan M. Alwi Dahlan)*. *Mediakom*, 2(2), 100. <https://doi.org/10.32528/mdk.v2i2.1922>